



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat
Telepon: 021-3852478, Faksimili: 021-3441258

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

Nomor : PENG- 01/SET.M.EKON.ULP.POKJA.II/PMO-OMP/01/2019

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengembangan Strategi Implementasi dan Pelaksanaan *Program Management Office* (PMO) kepada Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Tahun Anggaran 2019
- Lingkup pekerjaan : Pengembangan Strategi Implementasi dan Pelaksanaan *Program Management Office* (PMO) kepada Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)
- Nilai total HPS : Rp5.496.311.700,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah), termasuk pajak-pajak
- Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2019
- Jangka waktu pelaksanaan : Maret s.d. Oktober 2019 (tujuh bulan kalender)

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang terintegrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Memiliki izin usaha bidang jasa konsultansi.
- c. Memiliki pengalaman bekerja di Indonesia dan Asia Tenggara dan dapat memobilisasi tenaga ahli secepatnya.
- d. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam memfasilitasi dan/atau menjalankan Program Management Office (PMO) baik di dalam dan/atau di luar Indonesia.
- e. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam membantu koordinasi intensif di/antar Kementerian/Lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD di Indonesia.
- f. Diutamakan memiliki pengalaman dalam mendukung pelaksanaan koordinasi dan *debottlenecking* di bawah Kementerian/Lembaga.
- g. Diutamakan berpengalaman dalam menyusun strategi atau kebijakan dan mendampingi implementasi rencana kerja dan implementasi penyelesaian isu strategis.
- h. Berpengalaman dalam menyusun strategi atau kebijakan dalam pengembangan kapasitas, baik untuk Pemerintah Pusat/Daerah atau Swasta, seperti seminar, workshop, dan sebagainya.
- i. Berpengalaman dalam mendukung penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi atas kegiatan dan program Kementerian/Lembaga kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk di antaranya Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masyarakat luas.
- j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

- k. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
- m. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
- n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan menandatangani Pakta Integritas.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi:

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE: lpse.lkpp.go.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 24 Januari 2019

Pokja Pemilihan II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian